

**ANALISIS KINERJA REALISASI ANGGARAN BELANJA
PADA DINAS PRASARANA JALAN TATA RUANG DAN
PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada Tim Penguji Program Studi Akuntansi (DIII)
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

**MUHAMMAD IVAN TAKOCHI
2014-14133045**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIPLOMA III

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2018

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS KINERJA ANGGARAN BELANJA PADA DINAS
PRASARANA JALAN TATA RUANG DAN PERUMUKIMAN PROVINSI
SUMATERA BARAT**

Nama : Muhammad Ivan Takochi
NIM : 14133045
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Padang, Januari 2018

Diketahui Oleh,
Koordinator Program Diploma III



Halkadri Fitra, SE, M.M, Ak
NIP. 19800809 201012 1 003

Disetujui Oleh,
Pembimbing



Vita Fitria Sari, SE, M.Si
NIP. 19870515 201012 2 009

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



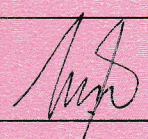
**ANALISIS REALISASI ANGGARAN BELANJA PADA DINAS
PRASARANA JALAN TATA RUANG DAN PERMUKIMAN PROVINSI
SUMATERA BARAT**

Nama : Muhammad Ivan Takochi
NIM : 14133045
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Penguji Tugas Akhir Program Studi
Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Januari 2018

Tim Penguji

- | Nama | TandaTangan |
|--|---|
| 1. Ketua : Vita Fitria Sari, SE, M.Si |  |
| 2. Anggota :Salma Taqwa, SE, M.Si |  |
| 3. Anggota : Mia Angelina Setiawan, M.Si |  |

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ivan Takochi
NIM/TM : 14133045/2014
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta/09 Agustus 1996
Program Studi : Diploma III
Keahlian : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Anggur Blok Q1 No.45 Wisma Indah II Lapai
Judul Tugas Akhir : **Analisis Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Prasarana Jalan
Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (ahli madya), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri, tanpa bantu lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya/pendapat yang telah ditulis/dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/tugas akhir ini sah, apabila telah ditandatangani **asli** oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **sanksi akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh karna karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, Januari 2018

Yang Menyatakan,



Muhammad Ivan Takochi

NIM. 14133045

ABSTRAK

**Muhammad Ivan Takochi : Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Belanja
Pada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan
Permukiman Provinsi Sumatera Barat**

Pembimbing : Vita Fitria Sari, SE. M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan instansi dalam melaksanakan program kerja pada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat. Alat – alat yang digunakan adalah rasio keuangan pemerintah antara lain Efisiensi, Efektifitas, Varian, Pertumbuhan dan Keserasian Belanja.

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penulis mengumpulkan data langsung dari Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat.. Bentuk penelitian yang penulis gunakan yaitu wawancara. Wawancara yang penulis lakukan dengan cara menanyakan secara langsung dengan salah satu karyawan bagian aset tetap. Gunanya untuk menambah wawasan dan pemahaman penulis.

Kesimpulan yang penulis dapat adalah bahwa Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan program dengan baik. Walau masih terdapat kegagalan program dikarenakan kesalahan penetapan program ataupun ketidaksiapan pelaksanaan instansi dalam menjalankan suatu program kerja

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuni-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul **“Analisis Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat”**. Tugas akhir ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Teristimewa untuk kedua orang tua, Ibunda Eva Lusida dan Ayahanda Jon Aleksi, serta adik saya Muhammad Nicko yang selalu memberikan doa dan dukungan baik berupa moral maupun materil.
2. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Halkadri Fitra, SE. M.M, Ak selaku Ketua Prodi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Vita Fitria Sari, SE, M.Si selaku pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta nasihat dalam berbagai hal terutama dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk memperbaiki dan kesempurnaan tugas akhir

6. Bapak dan Ibu dosen, Staf pengajar dan Karyawan program studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Pustakawan/wati Universitas Negeri Padang.
8. Karyawan dan karyawan/wati Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat.
9. Rekan – rekan mahasiswa program studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang khususnya Akuntansi Diploma III Ganjil dan Genap 2014.
10. Kepada teman-teman Riandi Yogi Pratama, Rios, fadil, rolland, fikri, genta yang telah ikut membantu dalam proses pembuatan Tugas Akhir
11. Seluruh teman – teman yang sudah membantu dan menolong seluruh kegiatan dari awal sampai akhir tugas akhir saya

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih banyak memiliki kekurangan, hal itu disebabkan karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki serta kurangnya kelengkapan buku – buku penunjang. Karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan isi Tugas Akhir ini, agar dapat berguna bagi pembaca untuk pengetahuan kita bersama, serta dapat bermanfaat khususnya bagi penulis.

Padang, Januari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Anggaran.....	12
B. Karakteristik dan Prinsip Anggaran.....	14
C. Laporan Realisasi Anggaran	16
D. Belanja	28
E. Kinerja Belanja	36
F. Pengertian Rasio	42
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	
A. Bentuk Penelitian	46
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	46
C. Rancangan Penelitian.....	47
D. Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Prusahaan	50
B. Hasil Penelitian	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Efisiensi.....	71
Tabel 2	Efektifitas	75
Tabel 3	Varian Belanja.....	78
Tabel 4	Pertumbuhan Belanja	81
Tabel 5	Keserasian Belanja	86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2016

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Instansi pemerintahan merupakan satuan kerja, lembaga, kesekretariatan dan instansi pemerintahan lainnya baik pusat maupun daerah yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lembaga tersebut memang sengaja dibentuk untuk mengurus segala macam hal yang berkaitan dengan jalannya sistem pemerintahan. Instansi pemerintah berperan sebagai pelaksana sekaligus pengontrolan semua kebijakan-kebijakan pemerintah. Instansi pemerintah memerlukan daftar ketetapan tentang langkah tindakan pada masa depan menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksananya, dimana, kapan jadwalnya dan berupa sumber daya yang akan digunakan, serta berbagai keterangan mengenai tolak ukurnya dalam rangka mencapai hasil. Oleh karena itu, instansi pemerintah memerlukan anggaran belanja yang berguna menunjang kegiatan di pemerintahan tersebut. Anggaran belanja yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sudah diatur dalam peraturan daerah dengan pertanggung jawaban dalam pengeluaran belanja.

Menurut Munandar (2001) menyatakan bahwa “Untuk pencapaian target indikator kinerja terhadap masing- masing sasaran pada lembaga harus didukung oleh beberapa program terkait. Setiap program terdiri dari beberapa kegiatan yang mendukungnya”. Terdapat hubungan yang tidak terpisahkan antara sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatan –

kegiatan. Salah satunya, evaluasi kinerja pada anggaran belanja yang merupakan analisa terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian terhadap target indikator yang telah ditetapkan sebelumnya pada penetapan kinerja.

Sementara Mulyadi menyatakan bahwa “Anggaran belanja merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Suatu anggaran operasi biasanya meliputi waktu satu tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun itu”. Dengan anggaran manajemen dapat menentukan efektifitas dan efisiensi suatu operasi dengan membandingkan antara anggaran dengan hasil aktual (realisasi terkini) yang dicapai. Oleh karena itu anggaran belanja yang digunakan oleh instansi merupakan hal yang penting untuk diawasi agar tidak terjadi pengeluaran yang seharusnya tidak diperlukan. Agar terlaksananya anggaran belanja yang efisien, efektif dan meningkatnya pertumbuhan belanja yang sesuai dengan peraturan daerah. Pemerintah dituntut untuk ikut berperan aktif dalam menghadapi tekanan tersebut. Pemerintah harus melakukan tindakan yang efisien dan memperhitungkan biaya ekonomi beserta dampak negatif serta penanggulangannya agar tidak terjadi hal yang sama ditahun – tahun berikutnya. Oleh karena itu pemerintah daerah harus melakukan anggaran belanja dengan efisien dan mengolah pengeluaran belanja dengan baik.

Untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi dari penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat langsung

dinyatakan dalam bentuk baik atau tidaknya, karena penilaian kinerja yang ada pada pemerintahan tidaklah sama dengan penilaian kinerja pada perusahaan atau bentuk lainnya dari perusahaan-perusahaan yang memperoleh laba dalam pelaksanaan teknisnya. Oleh karena itu dalam hal ini kesemua aspek yang ada dalam proses pengambilan keputusan dalam proses dan pedoman pembentukan penyusunan anggaran dan belanja agar terlaksana keefisienan dan keefektifan penggunaan anggaran yang ada yang telah dianggarkan. Dalam penilaian kinerja anggaran dapat dilihat dari seberapa jauh anggaran yang ada dan berapa realisasi yang akan disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan belanja pada instansi selama masa tahun anggaran satu tahun tersebut. Anggaran digunakan sebagai alat untuk merancang program kerja atau langkah-langkah yang akan dilakukan setiap aktivitas dapat terarah dan terkontrol dengan baik.

Berdasarkan Undang – Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai sasaran agar pengeluaran pemerintah dapat teridentifikasi dengan jelas dan terukur mengenai sesuatu yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran. Penjelasan pemerintah tersebut

mengisyaratkan semua pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal dilakukan sesuai jumlah yang ditetapkan dalam APBD, sehingga APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 75 Tahun 2013 tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjelaskan bahwa setiap pengeluaran daerah sudah memiliki ketentuan – ketentuan yang ditetapkan oleh Gubernur, sehingga dapat dengan mudah untuk dipertanggung jawabkan.

Menurut Mardiasmo (2004:169) menyatakan bahwa “Kelemahan utama dalam pengeluaran belanja adalah tidak adanya ukuran yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam proses perencanaan, ratifikasi (pengesahan), implementasi dan evaluasi pengeluaran belanja. Oleh Karena itu, pemborosan akan sangat mudah terjadi karena belanja yang tidak efisien sehingga belanja yang dikeluarkan melebihi dari anggaran yang sudah ditetapkan”.

Penentuan prioritas untuk tiap kegiatan pemerintahan masih belum baik. Pemerintah daerah umumnya belum melakukan identifikasi kegiatan untuk penyusunan prioritas. Tetapi, lebih banyak menyesuaikan dengan arahan prioritas kebijakan pemerintah pusat. Akibat orientasi seperti itu, maka tuntutan dan kebutuhan masyarakat setempat akan cenderung terabaikan.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2004:167) menyatakan bahwa “Lemahnya perencanaan pengeluaran akan memunculkan kemungkinan *underfinancing and overfinancing* yang keseluruhannya mempengaruhi tingkat efisiensi serta perumbuhan belanja dan efektifitas pada unit – unit kerja pemerintah daerah. Pada umumnya, masalah utama yang dihadapi unit kerja yang mengalami *underfinancing* adalah rendahnya kapabilitas program kerja untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan publik. Sedangkan untuk unit kerja yang menikmati *overfinancing* masalah yang dihadapi adalah efisiensi yang rendah”.

Dalam situasi seperti ini, menyebabkan banyak layanan publik dijalankan secara tidak efisien dan kurang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan publik, sementara dana pada anggaran daerah yang pada dasarnya merupakan dana publik (*public money*) yang habis dibelanjakan seluruhnya.

Belanja dalam laporan pelaksanaan anggaran merupakan komponen penting yang mengundang perhatian publik. Belanja daerah juga mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dan arah pembangunan daerah karena sifat belanja yang *relative* mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran, maka perencanaan dan pengendalian belanja sangat perlu dilakukan.

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 bahwa standar akuntansi pemerintah adalah prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Konsep

dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efisien dan efektif pemerintah daerah perlu menerapkan prinsip – prinsip manajemen belanja daerah secara cermat, konsisten dan berkelanjutan. Menurut Halim (2007:129) menyatakan bahwa “Pengelolaan keuangan daerah harus memperhatikan dua aspek dengan optimalisasi, yaitu aspek pendapatan dan pengeluaran. Tetapi, manajemen belanja daerah perlu mendapat perhatian lebih besar dibandingkan manajemen pendapatan, sebab mengeluarkan uang jauh lebih mudah dibandingkan memperolehnya. Dalam kondisi tertentu, seringkali menghemat anggaran lebih sulit dibandingkan mengejar target pendapatan”.

Disamping itu, korupsi lebih banyak terjadi pada aspek pengeluaran, seperti pada belanja pengadaan barang dan jasa dan belanja modal. Karena sifat pengeluaran yang mudah dilakukan dan rawan korupsi tersebut maka untuk mengurangi pemborosan anggaran, penyelewengan dan korupsi anggaran, pemerintah daerah perlu memperkuat manajemen belanja daerah. Hal itu penting karena manajemen belanja tidak sekedar terkait masalah teknis bagaimana menghemat pengeluaran. Tetapi, juga

terkait dengan strategi dan kebijakan bagaimana mengalokasikan anggaran secara efisien, efektif, adil dan merata.

Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat merupakan instansi pemerintah yang bergerak dibidang perizinan jalan, tata ruang dan permukiman. Instansi pemerintah tersebut memiliki tanggung jawab penuh terhadap anggaran yang telah ditetapkan, sehingga melalui kegiatan belanja tersebut dapat dilihat apakah pelaksanaan anggaran belanja sudah terealisasi atau belum.

Selain masalah korupsi yang biasa terjadi pada umumnya tak hanya pada instansi ini. Hal lain yang menjadi masalah pada instansi tersebut adalah masalah program kerja pembangunan jalan yang secara khusus, kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi tersebut. Kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan tetapi tidak terlaksana karena masalah pada kontrak pembangunan serta kendala lainnya berupa pembatalan program kegiatan yang disebabkan oleh lahan yang tidak memadai dan program kerja yang tidak sesuai dengan ketetapan yang telah disepakati.

Perjalanan dinas dan kendaran dinas juga termasuk menjadi masalah yang harus dievaluasi instansi karena seringnya perjalanan dinas dilaksanakan dengan dalih untuk menunjang pertumbuhan instansi dan mempelajari pembangunan daerah di provinsi lain serta ketidakpastian dalam penentuan bahan bakar minyak.

Rencana pembangunan pengadaan perpustakaan juga termasuk menjadi masalah yang harus dievaluasi karena rencana yang sudah disusun

atau ditetapkan tidak terealisasi dengan rencananya. Alasan karena tidak terealisasinya perencanaan tersebut adalah karna tidak adanya perpustakaan di instansi tersebut. Dengan anggaran yang telah dikeluarkan tetapi rencana yang sudah ditetapkan tidak berjalan dengan semestinya. Dengan alasan untuk memperluas pengetahuan dengan menambahkan perpustakaan sebagai alasan untuk mengeluarkan anggaran untuk pengadaan perpustakaan, sedangkan di instansi tersebut tidak dilengkapi dengan perpustakaan. Hal ini pun cukup menyita perhatian.

Tetapi secara keseluruhan permasalahan yang terjadi disebabkan penetapan program kerja anggaran belanja yang tidak sesuai dengan kemampuan instansi dalam melaksanakan suatu program kerja. Sehingga program kerja anggaran belanja yang telah disusun tidak dapat terealisasi dengan baik. Hal ini yang mengakibatkan permasalahan dalam pencapaian kinerja pada anggaran belanja yang harus dievaluasi dan memperbaiki sistem kinerja penetapan anggaran belanja.

Oleh karena itu, permasalahan ini harus segera diselesaikan oleh instansi terkait dan sebab itulah kinerja anggaran belanja memiliki peran untuk memperlihatkan kepada instansi tentang anggaran belanja tiap tahunnya. Dan dengan memperlihatkan tingkat pencapaian kinerja anggaran, maka instansi dapat mengevaluasi dan mempelajari apa yang harus diperbaiki baik itu sistem anggaran maupun program kerja anggaran.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan mengembangkan pembahasan melalui rasio

efisiensi, efektifitas, varian belanja, pertumbuhan belanja dan keserasian belanja. Karena rasio tersebut menunjukkan keberhasilan atau ketidakmampuan instansi dalam pencapaian kegiatan dan memperlihatkan pertumbuhan belanja di dalam instansi tersebut. Dimana rasio tersebut membandingkan tingkat kemampuan dalam pengeluaran belanja serta ketepatan dalam mengeluarkan belanja dengan hasil yang sesungguhnya ingin dicapai serta memperlihatkan pertumbuhan belanja dalam suatu instansi. Dengan melihat Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan APBD pada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu “Bagaimana kinerja anggaran belanja Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat tahun 2012 sampai dengan 2016?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu :

“Untuk menganalisa apakah pengeluaran anggaran belanja dan pertumbuhan belanja sudah terealisasi dengan baik pada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat”

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka manfaat dari dilakukan penelitian, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai rasio pada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat. Sehingga dapat memantapkan teori dengan praktek di lapangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan konsep mengenai analisis rasio efisiensi, efektifitas, varian, pertumbuhan dan keserasian belanja pada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan yang terjadi dalam instansi pemerintah, khususnya bagian bendahara pengeluaran yang berhubungan dengan rasio efisiensi, efektifitas, varian, pertumbuhan dan keserasian belanja.

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk mendukung kegiatan dan dapat dipertimbangkan bagi instansi yang bersangkutan dalam menganalisa rasio

efisiensi, efektifitas, varian, pertumbuhan dan keserasian belanja.

c. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu dan pengetahuan mengenai rasio belanja pada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat dan sebagai acuan dalam penelitian.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam suatu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi, efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketentuannya terhadap peraturan perundang-undangan. Seiring dengan reformasi dibidang keuangan Negara maka perlu dilakukan perubahan-perubahan diberbagai bidang untuk mendukung agar reformasi dibidang keuangan Negara dapat berjalan dengan baik.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan terhadap Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja pada instansi tersebut cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan program kerja yang sesuai dengan yang telah direncanakan oleh instansi tersebut.

Namun masih terdapat beberapa masalah yang ada pada instansi tersebut. Pada tahun 2012 - 2016, permasalahan pada program kerja yang salah satunya adalah aspek pembangunan gedung terkendala dikarenakan gagal tender bahkan putus kontrak dengan PT yang bersangkutan sehingga program tersebut tidak terlaksana.

Selain masalah pada pembangunan gedung, terdapat juga masalah internal di instansi tersebut. Seperti perencanaan pengadaan perpustakaan. Namun perencanaan program tersebut tidak terealisasi dikarenakan di instansi tersebut tidak terdapat perpustakaan, sehingga perencanaan tersebut tidak bisa di laksanakan.

B. Saran

Berdasarkan pada penelitian dan dari kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran kepada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat dalam beberapa pandangan ataupun penjelasan terkait permasalahan yang sering terjadi pada instansi tersebut, antara lain :

1. Bagi Instansi

Dari sekian aspek lima rasio tersebut terdapat permasalahan yang terjadi seperti permasalahan pada pembangunan gedung karena sengketa tanah. Agar hal tersebut tidak terjadi kembali sebelum instansi akan melaksanakan program kerja tersebut, seharusnya instansi memantapkan rencananya tersebut agar tidak menemui kendala yaitu dengan menyelesaikan atau memperjelas dokumen - dokumen yang menyangkut dengan tanah atau lokasi yang nantinya akan dibangun. sehingga proses pembangunan nantinya tidak terganggu dan dapat berjalan seperti yang direncanakan.

Selain itu pada masalah belanja, seharusnya instansi harus mempertimbangkan apakah belanja yang akan dilakukan benar – benar diperlukan atau tidak. Anggaran yang telah diberikan seharusnya dimanfaatkan untuk hal yang benar - benar diperlukan. Sehingga mengurangi

pemborosan dan terhindar dari infisiensi anggaran agar tingkat keefisienan dan keefektifan tercapai dengan baik.

2. Bagi peneliti

Dalam penelitian dan perhitungan yang dilakukan, diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat menjadi acuan dalam memperlihatkan kondisi kinerja anggaran belanja.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah. 2010. *Akuntansi Pemerintahan Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Perdana Media Group
- Nazir. 2003. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Halim. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat
- Nordiawan. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat
- Nordiawan. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 75 Tahun 2013 tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Supardi. 2005. *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta